

DAFTAR PUSAKA

BUKU – BUKU

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Fresfektif Hukum*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Agustinus F. Paskalino Dadi, *Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan inplikasinya Terhadap Terhadap Masalah Kerugian Negara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.*
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggung Jawab dan Pemeriksaan BUMN*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2013.
- Abdullah Hehamahua, dalam Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara datam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenenda Media Group, Jakarta, 2012.
- Alvi Syahrin, dalam Syabrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Forma Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas, CV V. Mandar Maju, Bandung, 2012.*
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2010)
- Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universtas Pajajaran, Bandung, 2011.
- Bambang Poenomo, *Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-7, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Chairudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT.Re fika Aditama, Bandung, 2008.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinetja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011.
- D. Y. Wiyanto, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual*, Mandar Maju Bandung, 2012..
- D. Belifante dan Boerhanuddin Soetan Batoetah, *Pokok-Pokok Hulam Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Metode dan Teknik Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Ceramah Disampaikan di Semarang, 28 Maret 2012.
- Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Edi Setiadi dan Rena Yuia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Fockema Andreae, dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hulaim Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendikia Jakarta 2007, hlm.36
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisi Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Sosial di Indonesia*. Nuansa Aulia Bandung, 2012.
- JM. Van Bemmelen, *Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, diterjemahkan oleh Hassan, *Hukum*
- JM Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, 2003, PT. Alumni Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1992.

- Muhamad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Muhamad Djafar Saidi, *Hukum keuangan Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Marjane Termohuijen, *The Principle Legality, Course Materials Netherlands Lecturer pada Refreshing Course of Criminal Law Same Root Different Development, Co-organized and supported by Faculty of Law Pajadjaran University, Alumni Postgraduate Programe of Criminal Law*, Bandung, 19-12 April Tahun 2006 Tanpa Halaman.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenenda Media Group, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yaya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke Tiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Man Sastrawidjaja, *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) dalam Rezim UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis*, Kompilasi Hukum Bisnis, CV Keni bekerjasama dengan FH UNPAD, Bandung, 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1988.
- Nindyo Pramono, *Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, dalam Sri Rejeki Hartono, *et.al,ed., Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2006.
- Machrup Elrick ed, *Kapita Selekia Hukum, Mengenang Almarhum Prof H. Oemar Seno Adji, SH*, Tulisan Andi Hamzah dengan judul Hukum Pidana adalah Salah Satu Ceimin Yang Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa, Ghalia Indonesia, 1995.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, LAKSBANG Mediatma, Surabaya, 2008.
- Prasetio, *Dilema BUMN : Benturan Penerapan Bussiness Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayanna Komunikasindo, Jakarta, 2014.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Penelitian, Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannva dengan BUMN/Persero*, 2010.
- Komariah E. Sapardjaja, S.H., PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.

- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku I, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selecta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku I.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisi Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Jakarta 2016, hlm. 223
- Roscoe Pound. *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven : Yale University Press, 1959.
- Robert Cooter dan Thomas Ulten, *Law and Economics*, Fourth ed., Pearson Education Ltd, 2004.
- Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Privatisasi BUMN*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Rudi Prasetyo, *Perkembangan dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang 23-24 November 1989.
- Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1981.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Boston Toronto London: Little, Brown and Company, 1992.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak -tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Rufmus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi: Suatu Terobosan Hukum*, KPG, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (PT. Pembangunan, Jakarta, 1995).
- Steven H. Gifis dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sigid Suseno, *Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia*, dalam *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Editor: Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, Artikel ditulis dalam rangka Purnabakti 70 Tahun

- Sutan Remy Sjandeni, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.
- S.H. Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3S, Jakarta, 1987
- S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta. 1986)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016)
- T. Mulya Lubis *Hak Asasi Manusia dan dilema Politik Hukum di Indonesia Pada Masa Orde Baru 1996-1990*, YLBHI, Jakarta Tanpa Halaman.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media Thn, 2011.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalatn Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1144 K/Pid/2006
- Putusan MA Nomor 1764 K/Pid.Sus/2009.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2149 K/Pid.Sus/2011.

INTERNET

- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>, Indeks Presepsi Korupsi Indonesia per tahun berdasarkan data *Transparency International Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 April 2017.
- Widiada, *Kebijakan Legislasi tentang Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, 2008.
- Istilah resmi yang dipergunakan oleh UU Korupsi. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa terminologi untuk menyebutkan prinsippembuktian terbalik, yaitu pembalikan beban pembuktian yaitu *Shifng burden of proof* atau *Reversal burden of proof* (Inggris), *Omkering van de bewijslat* (Belanda) *Onus of Proof* (Latin). Lihat Lilik Mulyadi,

Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Penerbit Alumni, Bandung, 2008.

-----Muladi, *Ambiguitas Dalam Penerapan Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remidium dan doktrin Primum Remidium*, Makasar 18 Maret 2013. Diakses dari <http://www.goegle.co.id> pada tanggal 12 Desember 2016.

-----Yeniti Garnasih, *Ultimum Remedium*, LBH Pers. Diakses dari <http://www.gogle.co.id>. pada tanggal 20 Februari 2017.

-----http://www.sikad.bpk.gold/nw_detail.php?n_id=22, diunduh pada tanggal 22 November 2017

-----<http://www.penataanruang.net/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

-----Erman Rajagukguk, “*Komentar Hukum Minggu Ini*”, <http://www.ennanhukum.com/>, diunduh pada tanggal 20 Desember 2017.

-----Pada Tahun 2009, Hariyadi B. Sukamdani merupakan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Kepabeanan.

-----Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan”, http://www.sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=22. Diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

-----<http://www.hukumonline.com/beritaJbaca/h4f4af449cbb9b/prof-dr-nindyo-pramono-shms-brancaman-pidana-dalatr-hukum-bisnis>. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2018.